

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Hidayatur Rahmaniyyah, 2023, "Peran Wali Kelas dalam Pembinaan Kedisiplinan Siswa MIN 5 Kota Banjarmasin", Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di MIN 5 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran wali kelas dalam membina kedisiplinan siswa di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali kelas memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pengawasan, motivasi, dan pembinaan kepada siswa agar siswa dapat mematuhi tata tertib sekolah dengan baik. Selain itu, wali kelas juga melakukan pendekatan kepada siswa yang mengalami permasalahan serta menjalin komunikasi dengan orang tua siswa dalam mendukung pembinaan siswa di sekolah. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan siswa dilakukan melalui pemberian nasihat, pengawasan perilaku siswa, serta pemantauan perkembangan siswa secara berkelanjutan. Dengan adanya perhatian dan pendampingan dari wali kelas, proses pembinaan siswa dapat berjalan dengan lebih baik sehingga perilaku disiplin siswa dapat meningkat di lingkungan sekolah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai peran wali kelas atau Guru Wali dalam membina dan mendampingi siswa di sekolah. Kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya peran Guru Wali dalam memberikan arahan,

pengawasan, dan pembinaan kepada siswa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan jenjang pendidikan. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembinaan kedisiplinan siswa di tingkat madrasah ibtidaiyah, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan peran Guru Wali dalam pendampingan siswa di lingkungan SMK.

2. Rose Fitria Lutfiana, Aflahul Awwalina Mey R., dan Trisakti Handayani, 2021 , “Analisis Implementasi Budaya Sekolah dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik”, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Karakter Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di MAN Kota Batu Jawa Timur pada tahun 2020 dengan subjek penelitian terdiri dari Plt. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, guru PPKN, guru Akidah Akhlak, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 bentuk budaya sekolah yang diterapkan dalam membentuk karakter religius peserta didik. Implementasi budaya sekolah dilakukan melalui kegiatan harian, mingguan, dan tahunan yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Kegiatan harian meliputi salam, senyum, sapa, membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran, salat duha, salat berjamaah, serta penggunaan

busana yang sopan. Kegiatan mingguan meliputi salat Jumat berjamaah, kegiatan keputrian, literasi, dan hafalan surat pendek. Sedangkan kegiatan tahunan meliputi peringatan hari besar Islam dan pondok Ramadan. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi budaya sekolah, seperti karakteristik siswa yang beragam, lingkungan yang kurang mendukung, serta kurangnya komitmen sebagian guru. Adapun solusi yang dilakukan sekolah yaitu dengan pendekatan khusus kepada siswa, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, dan memperkuat komitmen seluruh warga sekolah dalam menjalankan budaya sekolah secara konsisten.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan mengenai implementasi budaya sekolah dan keterlibatan guru dalam membina serta membentuk karakter siswa di lingkungan sekolah. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan budaya sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif.

Sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter religius peserta didik melalui budaya sekolah di MAN Kota Batu, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman dalam penguatan peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum (Said Zainal Abidin, 2016:3).

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018: 7), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik, maupun warga negara.

Menurut Fredrich dalam Agustino, (2017: 66) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Anderson dalam (Irawaty Igrisa, 2022:32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah

sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Sementara itu, Menurut David Easton kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah (Ida Syafriyani, 2023:3).

b. Tahap-tahap Kebijakan

Menurut William Dunn N Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2022:

4- 6) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga

sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut. Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy Issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Faktor menurut Suharno dalam Siti Marwiyah (2022:49-5) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan risiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang

salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar. seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu kegiatan.

Menurut Zainal Abidin (2019) Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketepatan strategi implementasi.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

1) Teori Donald Van Metter Dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Leo Agustino, 2016:133-136) ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yakni:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu mengubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh

mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S Grindle, dipengaruhi oleh dua variabel yakni : (Irawaty Igrisa, 2022:69-70)

- a) Isi Kebijakan, yang mencakup kepentingan kelompok sasaran dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, ketepatan letak sebuah program, sebuah kebijakan menyebutkan aparat, pelaksanaanya dengan rinci, dan sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
- b) Lingkungan kebijakan, yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

3) Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model ini disebut kerangka analisis implementasi, Mazmanian dan Sabatier (Sahya Anggara, 2018:268-269) berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, antara lain sebagai berikut.

- a) Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan, yang mencakup kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- b) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, yang mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakan teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumber dana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, dan akses formal pihak luar.
- c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, yang mencakup kondisi

sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

4) Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A Gun

Hogwood and Gun adalah seorang penulis Inggris yang sangat membela pandangannya tentang pentingnya pendekatan top-down untuk proses implementasi. Bagi mereka, pendekatan bottom-up yang cenderung menangani masalah implementasi berdasarkan kasus per kasus tidak menarik karena pembuat kebijakan adalah individu yang dipilih secara demokratis dan pandangan mereka tentang implementasi tidak melanggar demokrasi.

Ide dasar mereka berasal dari publikasi Gun yang menyelidiki penyebab kegagalan implementasi. Publikasi ini sedang dikembangkan dengan karyanya yang berjudul "*Policy Analysis for the Real World*". Di dalam tulisan tersebut memberikan proporsi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan dalam (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022: 34- 35) antara lain sebagai berikut:

- a) Situasi di luar lembaga atau organisasi pelaksana tidak secara serius menghambat proses implementasi.
- b) Waktu dan sumber daya yang cukup tersedia untuk mengimplementasikan program.
- c) Tidak ada batasan dalam penyediaan semua sumber daya yang Anda butuhkan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap tahapan dalam proses implementasi.
- d) Kebijakan yang diterapkan didasarkan pada teori kausal atau sebab akibat yang valid.
- e) Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan antara atau intervening variabel.
- f) Diimplementasikan oleh satu lembaga yang terlibat hubungan kelembagaan ketergantungan sangat rendah.
- g) Adanya pemahaman yang utuh dan konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dan kondisi ini harus ada sepanjang proses implementasi.
- h) Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk mensignifikasikan tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang turut terlibat dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna.

5) Teori Menurut Charles O. Jones

Menurut Jones dalam buku Leo Agustino (2016: 54- 55) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

a) Organisasi

Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

b) Interpretasi

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c) Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi, dan penerapan, penulis memaknainya sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

6) Teori George C. Edward III

Dalam pandangan George C. Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel (Herabudin, 2016: 27-3), yaitu:

a) Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh

kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks, serta ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Penguatan Peran Guru Wali

Secara etimologis, peran (*role*) merupakan bagian dinamis dari kedudukan atau status yang melekat pada seseorang. Poerwadarminta menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam tatanan masyarakat, sehingga ketika perilaku tersebut memang diharapkan, individu yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan, guru wali atau wali kelas menempati posisi strategis sebagai penghubung antara sekolah, siswa, dan orang tua. Sanjaya menegaskan bahwa wali kelas berperan menata dan mengelola siswa binaannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia ideal sesuai harapan orang tua dan masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Petriani dan Ananda menekankan bahwa guru atau wali kelas perlu menata dan mengelola lingkungan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan sekaligus terhindar dari kejenuhan bagi siswa. Oemar Hamalik turut menempatkan guru sebagai unsur sentral dalam sistem dan proses pendidikan, karena keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada peran yang dijalankan oleh pendidik (dalam Tatang, 2016: 0).

Pemahaman mengenai peran guru wali dapat pula dijelaskan melalui teori peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Biddle (1986). Menurut Biddle, peran merupakan perilaku yang dikaitkan dengan posisi tertentu dalam suatu sistem sosial, yang muncul dari harapan bersama mengenai bagaimana pemegang posisi tersebut seharusnya bertindak. Dalam kerangka ini, guru wali menempati suatu posisi formal yang membawa serangkaian harapan peran (*role expectation*) dari sekolah, siswa, maupun orang tua. Ketika harapan tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas dan dukungan yang memadai, dapat timbul kesenjangan peran (*role strain*) yang menghambat guru wali menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, penguatan peran pada dasarnya juga merupakan upaya menyelaraskan harapan formal terhadap guru wali dengan kemampuan

nyata yang dimilikinya dalam menjalankan tugas pembinaan dan pencegahan kekerasan.

Penguatan dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang bertujuan agar pelaksana kebijakan mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penguatan peran guru wali dimaknai sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kesiapan, dan efektivitas guru wali dalam menjalankan fungsi pembinaan serta pencegahan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah.

Penguatan tidak sekadar berarti memberikan tambahan tugas kepada guru wali, melainkan memastikan bahwa guru wali memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan peran tersebut secara profesional. Bekal tersebut meliputi pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawabnya, keterampilan dalam mendampingi siswa, serta dukungan lingkungan kerja yang memungkinkan tugas tersebut dapat dijalankan secara nyata. Tanpa adanya penguatan, peran guru wali cenderung hanya bersifat administratif, seperti mengelola data siswa atau mengawasi kehadiran, sehingga fungsi pembinaan dan perlindungan siswa tidak terlaksana secara maksimal.

Melalui penguatan, guru wali diarahkan untuk menjadi figur pendamping yang mampu memahami kondisi psikologis, sosial, dan perilaku siswa. Guru wali tidak hanya berinteraksi dalam konteks pembelajaran, tetapi juga berperan dalam membangun komunikasi yang terbuka, menciptakan rasa aman, serta mendeteksi secara dini potensi

terjadinya konflik atau tindakan kekerasan. Dengan demikian, penguatan menjadikan guru wali sebagai pihak yang aktif melakukan langkah-langkah preventif, bukan sekadar menindak setelah terjadi pelanggaran.

Selain itu, penguatan juga berkaitan dengan peningkatan keterampilan interpersonal guru wali, seperti kemampuan berkomunikasi secara empatik, memberikan bimbingan, menyelesaikan permasalahan siswa secara persuasif, serta bekerja sama dengan pihak lain seperti guru bimbingan konseling dan manajemen sekolah. Keterampilan tersebut penting karena pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya melalui aturan, tetapi membutuhkan pendekatan manusiawi yang mampu membangun kedekatan antara guru dan siswa.

Dengan adanya penguatan, peran guru wali mengalami pergeseran dari fungsi administratif menuju fungsi edukatif dan preventif. Guru wali menjadi lebih terlibat dalam membentuk lingkungan sekolah yang kondusif, mengawasi dinamika hubungan antar siswa, serta menanamkan nilai-nilai karakter seperti saling menghargai, disiplin, dan tanggung jawab. Peran yang diperkuat ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan sehingga potensi kekerasan dapat diminimalkan sejak awal.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan peran guru wali dalam penelitian ini dipahami sebagai proses peningkatan kemampuan dan optimalisasi fungsi guru wali agar mampu menjalankan tugas pembinaan, pendampingan, dan pencegahan kekerasan terhadap siswa secara efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

4. Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 mendefinisikan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun secara sadar di lingkungan sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital bagi seluruh warga sekolah. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif-kuratif menuju pendekatan promotif-preventif yang melibatkan seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat secara partisipatif.

Konsep ini sejalan dengan gagasan iklim sekolah (*school climate*) yang dikemukakan oleh Hoy, yang menyatakan bahwa iklim sekolah merupakan istilah umum yang mengacu pada suasana, nuansa, dan corak lingkungan pergaulan di sekolah, sebagaimana layaknya kepribadian pada diri individu (2002). Emmons menambahkan bahwa iklim sekolah tercermin dari kualitas dan intensitas interaksi yang terjalin antara pendidik dan peserta didik di lingkungan sekolah (dalam Scherman, 2002).

Terciptanya rasa aman dan nyaman juga dapat dijelaskan melalui teori kebutuhan dasar manusia dari Maslow, yang menempatkan kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*) sebagai kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi setelah kebutuhan fisiologis, sebelum individu dapat berkembang menuju kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks sekolah, pemenuhan kebutuhan rasa aman ini menjadi

prasyarat agar peserta didik dapat belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal tanpa rasa takut terhadap ancaman kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan.

Cohen, McCabe, Michelli, dan Pickeral (2009) menjelaskan bahwa iklim sekolah yang positif dibangun dari empat dimensi utama, yaitu keamanan (baik fisik maupun sosial-emosional), hubungan interpersonal, proses belajar mengajar, serta lingkungan fisik sekolah. Sebuah sekolah dengan iklim yang sehat menumbuhkan norma dan nilai bersama yang membuat seluruh warga sekolah merasa aman secara sosial, emosional, dan fisik, sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara utuh. Kerangka ini sejalan dengan konsep budaya sekolah aman dan nyaman dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, di mana keamanan bukan hanya persoalan bebas dari ancaman fisik, tetapi juga menyangkut kualitas relasi dan pengalaman sehari-hari seluruh warga sekolah.

Salah satu dimensi penting dalam mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman adalah upaya pencegahan kekerasan. Pencegahan kekerasan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi, dan mengendalikan kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan individu baik secara fisik, psikologis, maupun sosial sebelum tindakan tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks pendidikan, pencegahan kekerasan tidak hanya dipahami sebagai usaha menghentikan perilaku negatif, tetapi sebagai bagian integral dari proses pembinaan peserta didik agar mampu berkembang dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan mendukung pertumbuhan karakter.

Pencegahan kekerasan didasarkan dari pemahaman bahwa kekerasan bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan nilai, ketidak mampuan mengelola emosi, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyentuh aspek individu, lingkungan, dan sistem pendidikan itu sendiri.

Secara konseptual, pencegahan kekerasan memiliki sifat antisipatif dan edukatif. Antisipatif berarti tindakan dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan edukatif berarti pendekatan yang digunakan menekankan pada pembinaan, pemahaman, dan kesadaran, bukan semata-mata hukuman. Sekolah tidak hanya bertugas menindak perilaku kekerasan, tetapi membangun kondisi yang membuat kekerasan tidak memiliki ruang untuk berkembang.

Pendekatan pencegahan kekerasan yang bersifat menyeluruh ini sejalan dengan model pencegahan bullying yang dikembangkan oleh Olweus (1993) melalui Olweus Bullying Prevention Program. Model tersebut menekankan bahwa pencegahan kekerasan di sekolah efektif dilakukan melalui empat prinsip utama, yaitu menunjukkan kehangatan dan perhatian positif dari orang dewasa kepada siswa, menetapkan batasan yang jelas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima, menerapkan konsekuensi yang konsisten dan tidak bersifat kekerasan, serta menempatkan orang dewasa sebagai figur otoritas yang positif. Dalam konteks penelitian ini, guru wali dapat dipandang sebagai figur dewasa

yang paling dekat dengan siswa di lingkungan sekolah, sehingga keempat prinsip tersebut relevan diterapkan melalui penguatan peran guru wali dalam mencegah dan menangani kekerasan.

Pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui pembentukan budaya sekolah yang positif. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai saling menghargai, empati, tanggung jawab, dan kedisiplinan akan membentuk pola interaksi yang sehat antar peserta didik. Ketika siswa terbiasa berada dalam lingkungan yang menghargai perbedaan dan menolak tindakan merendahkan, maka kecenderungan melakukan kekerasan akan berkurang secara alami.

Selain itu, pencegahan kekerasan juga berkaitan erat dengan pendidikan karakter. Melalui proses pembelajaran dan pembinaan, siswa diajarkan untuk mengenal nilai moral, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta mengembangkan kemampuan mengendalikan diri. Pendidikan karakter berfungsi sebagai benteng internal yang membuat siswa mampu menolak perilaku agresif karena memiliki kesadaran etis, bukan karena takut terhadap sanksi.

Aspek penting lainnya dalam pencegahan kekerasan adalah penguatan hubungan sosial yang sehat antara warga sekolah. Hubungan yang terbuka antara guru dan siswa memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif sehingga masalah yang dialami siswa dapat diketahui lebih dini. Kedekatan ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan, sehingga potensi konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan bimbingan, bukan melalui tindakan kekerasan.

Pencegahan kekerasan juga memerlukan pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kehadiran pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memperhatikan perkembangan perilaku siswa, membantu mereka memahami aturan, serta memberikan arahan ketika muncul gejala perilaku menyimpang. Dengan pendampingan yang konsisten, sekolah dapat mendeteksi potensi masalah sejak tahap awal dan melakukan intervensi yang bersifat membina.

Lebih jauh lagi, pencegahan kekerasan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah, bukan hanya individu tertentu. Lingkungan yang aman tercipta melalui kerja sama antara pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan sistem sekolah yang mendukung terciptanya interaksi yang harmonis. Upaya ini membutuhkan konsistensi dalam penerapan nilai, keteladanan dalam perilaku, serta komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan.

Dengan demikian, pencegahan kekerasan merupakan pendekatan komprehensif yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang berkarakter, mampu mengelola emosi, menghargai orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Pencegahan bukan hanya bertujuan menghilangkan kekerasan, tetapi membangun lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara utuh, baik secara intelektual, sosial, maupun moral.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini

dilakukan pada SMK Negeri Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk mengetahui implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman melalui penguatan peran guru wali di smk negeri babirik kabupaten hulu sungai utara. Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada dalam pandangan Edward III dalam buku Herabudin (2016: 27) ada empat faktor yang terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.



Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

